

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1, tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menyumbangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3).

Sementara pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat, maka Pemerintah telah menetapkan suatu standar nasional pendidikan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. SNP tersebut menjadi acuan dan kriteria bagi setiap satuan pendidikan dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran serta pengawasan terhadap setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan satuan pendidikan sehingga masing-masing bisa mencapai standar minimal bahkan diatas standar nasional yang ditentukan. Delapan SNP tersebut secara terperinci memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut : 1) Sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. 2) Bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 3) Untuk disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan, komponen pendidik merupakan faktor yang sangat menentukan perwujudan mutu pendidikan. Guru sebagai pendidik profesional dituntut memiliki empat kompetensi yakni kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan

kompetensi sosial. Keempat kompetensi ini menjadi standar untuk mengukur profesional guru. Sementara dalam standar proses dikatakan bahwa standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

Secara umum bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, walaupun setiap tahun mengalami kenaikan namun kenaikannya belum signifikan. Litbang (dalam kemmendikbud, 2012) mengungkapkan berdasarkan data penelitian Human Development Index (HDI) pada tahun 2012 kualitas pendidikan Indonesia di peringkat 124 dari 187 negara dan pada tahun 2013 naik tiga peringkat menjadi ranking ke-121 dari 185. Selanjutnya berdasarkan data Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2014, indeks pembangunan pendidikan (Education Development Index/EDI) untuk Indonesia 0,938. Nilai ini menempatkan Indonesia di posisi ke-57 dari 115 negara di dunia. Posisi Indonesia termasuk dalam EDI sedang, namun masih tertinggal dari Brunei yang berada di peringkat ke-34 yang masuk kelompok pencapaian sangat tinggi bersama Jepang yang mencapai posisi nomor satu di dunia. Sementara Singapura peringkat ke-18 dan Malaysia berada di peringkat ke-6. Meskipun demikian posisi Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dari Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (109).

Mewujudkan pendidikan berkualitas memang tidak semudah membalik telapak tangan karena pendidikan itu merupakan sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, maka banyak faktor yang saling terkait dan memengaruhi. Harus diakui

bahwa hal yang paling urgen dalam membangun pendidikan yang berkualitas harus dimulai dari membangun guru, karena guru merupakan inti dari pendidikan itu sendiri, dimana guru merupakan ujung tombak melaksanakan pembelajaran. Perbaikan atau penyempurnaan kurikulum, kepemimpinan yang baik, sarana dan prasarana yang lengkap tidak menjamin terwujudnya pendidikan yang berkualitas apabila tidak didukung guru yang berkualitas.

Sebagaimana dikemukakan Soetopo dalam (Kompri 2015 : 161) tanpa guru, pendidikan akan berjalan timpang karena guru merupakan orang kunci (*key person*) dalam proses pelaksanaan pendidikan. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh peranan guru sebagai figur yang bisa diteladani. Guru harus selalu berkembang dan dikembangkan agar perolehan subjek didik terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai dapat maksimal.

Menurut UU No 14 tahun 2005 bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas suatu satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati dan raganya. Kita semua tahu, bahwa dari sekian banyak komponen pendidikan, guru dan dosen merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang kita tanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan kita, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermartabat dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan.

Selanjutnya dikatakan bahwa guru harus menyadari bahwa mereka adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai tenaga profesional, maka guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional ( UU No 14 tahun 2005).

Guru sebagai jabatan profesional sudah seharusnya dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, namun masih ditemukan ada guru dalam melaksanakan tugasnya tidak profesional, dan sudah menjadi rahasia umum misalnya guru terlambat masuk kelas, menggunakan sumber belajar yang hanya terfokus kepada buku teks, RPP yang tidak lengkap. Menurut hasil angket kepada duapuluh lima guru di SMKN 1 Merdeka, Kabupaten Karo bahwa diperoleh sebanyak 58 % guru jarang menerapkan teori-teori belajar untuk kegiatan proses belajar mengajar dan 14 % tidak pernah mengaplikasikannya (Purba 2014 : 5). Sementara itu hasil survey awal oleh Dewi (2014 : 4) terhadap salah satu pengawas SMP bidang studi Bahasa Indonesia di kabupaten Deli Serdang Bedagai menemukan masih banyak guru yang melakukan *copy paste* terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP tersebut berasal dari internet atau *file* guru dari sekolah lain. Guru tidak memiliki program tahunan, program semester, silabus bahkan RPP.

Selanjutnya hasil wawancara Soni (2014:6) bahwa guru-guru di SMA Negeri Unggul Aceh Timur dari 30 orang guru diperoleh data bahwa hanya 40% (12 orang) guru yang menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap kali pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran yang dilaksanakan hanya berdasarkan keinginan guru dan juga kondisi siswa di kelas. RPP hanya berupa *softcopy* di dalam laptop dan tidak dicetak untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengajar, sehingga RPP hanya berfungsi sebagai bagian administratif dalam pembelajaran.

Demikian juga hasil survey awal Naibaho (2015) melalui wawancara dengan pengawas SMP bidang studi Bahasa Indonesia di Kota Binjai tanggal 23 Maret 2015, mengatakan sekitar 60 % dari 57 guru binaannya masih melakukan *copy paste* dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP tersebut berasal dari internet atau *file* guru dari sekolah lain. Selanjutnya 25 % guru yang tidak memiliki program tahunan, program semester, silabus bahkan RPP. Bahkan pengawas mengatakan masih banyak guru yang tidak mau disupervisi atau sengaja menghindar bila seorang pengawas datang ke sekolah untuk melakukan supervisi di kelas.

Guru selain memegang jabatan profesional, juga memiliki peran yang sangat strategis karena terlibat langsung dalam pembelajaran, yaitu sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan penilai pembelajaran bahkan sampai proses evaluasi dan perbaikan atau pengayaan. Untuk itu guru seharusnya berusaha untuk memperbaharui ilmu dimilikinya, memperbaharui kinerjanya melalui berbagai kegiatan, latihan dan lain sebagainya. Seperti yang

diungkapkan Sagala (2011 : 38) guru seharusnya dapat melakukan inovasi pembelajaran. Sebaliknya inovasi pembelajaran bagi guru relatif tertutup dan kreatifitas dinilai bukan bagian dari prestasi. Sehingga kemampuan guru tidak dapat berkembang, hal ini disebabkan karena guru belum menguasai materi bidang studinya sendiri, pedagogis, didaktik, dan metodik keahlian pribadi dan sosial, khususnya berdisiplin dan bermotivasi, kurangnya kerja tim antara sesama guru dan tenaga pendidik lainnya.

Sebagai tenaga profesional Sagala (2010 : 209) mengatakan dalam mengajar guru dan profesi pendidikan lainnya harus selalu sadar bahwa setiap program pembelajaran adalah suatu tahap penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan akhirnya mencapai tujuan pendidikan. Guru harus terampil mengelaborasi kurikulum menjadi bahan ajar dengan menempatkannya pada alokasi waktu yang tersedia mengacu pada pokok bahasan dan sub pokok bahasan dalam mendesain perencanaan pengajaran. Selanjutnya Sagala mengatakan bahwa kemampuan menggunakan berbagai pendekatan dan metoda mengajar serta teknik evaluasi untuk mengukur kemajuan belajar siswa menggambarkan kompetensi guru sebagai tenaga professional (2010:210)

Sebagaimana yang telah dikemukakan Sagala tersebut di atas tentunya tidak akan dapat dicapai dan diterapkan, tanpa usaha dan kerja keras dari guru.

Guru harus menyadari bahwa mendidik adalah pekerjaan mulia, mereka berhadapan bukan dengan benda mati, melainkan individu-individu yang unik dengan latar belakang budaya, ekonomi, potensi dan kepribadian yang berbedabeda. Sejatinya guru profesional sebelum melaksanakan proses pembelajaran

seharusnya sudah terlebih dahulu merancang model, pendekatan, metode, teknik evaluasi yang akan digunakan dalam pembelajaran, sehingga dengan demikian pembelajaran akan dapat berlangsung secara aktif, inovatif, efektif, menarik dan menantang. Intinya guru harus menguasai kompetensi profesionalnya.

Usaha-usaha untuk mempersiapkan guru menjadi tenaga profesional telah banyak dilakukan seperti lokakarya/workshop melalui MGMP/KKG, bimbingan teknis, diklat, supervisi dari kepala sekolah atau pengawas. Haryono dalam (Kompri 2015 : 145) menyatakan bahwa secara teknis kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru antara lain program : 1) pembimbingan dan penugasan; 2) pendidikan dan pelatihan; 3) studi lanjut; 4) promosi jabatan; 5) konferensi, lokakarya dan seminar; 6) pembinaan melalui supervisi pembelajaran. Sementara Collete dan Ciappetta dikutip Sprihartiningrum dalam Kompri (2015 : 173) kegiatan pengembangan profesi guru dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu studi lanjut, *inservice training*, memberdayakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), memberdayakan organisasi profesi, dan mengevaluasi kinerja mengajar di kelas, sertifikasi dan uji kompetensi. Secara Nasional Pemerintah mengadakan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk menjamin dan menjaga kredibilitas guru sebagai tenaga profesional dengan mendapat sertifikat profesional dan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan (tunjangan profesi) sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Namun kegiatan tersebut nampaknya belum secara signifikan memengaruhi kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran tepatnya

terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal itu senada dengan pendapat Kompri (2015 : 138) sejak kebijakan sertifikasi dilaksanakan, banyak pendidik yang memperoleh sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Pada 2007 guru yang tersertifikasi berjumlah 182.706 orang. Jumlah ini ditambah lagi pada 2008 sebanyak 171.575 orang. Jumlah ini belum termasuk hasil sertifikasi pada 2009-2010. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta merta memiliki kaitan yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Selain komponen guru, komponen kurikulum juga merupakan salah satu aspek yang memengaruhi mutu pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Taba (1962) dikutip Sanjaya (2008) dalam Fadlillah (2014 : 15) menyebutkan *a curriculum is a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of a curriculum.* : Selanjutnya Sahertian (2010 : 131) mengatakan kurikulum ialah sejumlah pengalaman belajar yang dirancang dan dibawah tanggung jawab sekolah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sebagai suatu program atau perencanaan pembelajaran untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Fadlillah (2014 : 13) mengungkapkan pengertian kurikulum sebagai berikut :

Kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Berhasil tidaknya sebuah pendidikan sangat bergantung dengan kurikulum yang digunakan. Kurikulum adalah ujung tombak bagi terlaksananya kegiatan pendidikan. Tanpa adanya kurikulum mustahil pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Karena itu, kurikulum sangat perlu untuk diperhatikan di masing-masing satuan pendidikan. Sebab, kurikulum merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan.

Sejak tahun ajaran 2013/2014 Pemerintah telah memberlakukan secara nasional kurikulum 2013 (Kurnas). Hal ini merupakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan ditengah persaingan global. Pada dasarnya kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum 2004 (KBK) dan kurikulum 2006 (KTSP). Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada peningkatan dan keseimbangan *soft skill* dan *hard skill* yaitu menitikberatkan penilaian sikap (jujur, santun, disiplin), pengetahuan dan keterampilan (melalui tugas praktek/proyek sekolah) dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Beberapa komponen dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang mengalami perubahan dari Kurikulum 2004 (KBK) dan Kurikulum 2006 (KTSP).

Tentunya sesuatu yang baru dibutuhkan pemahaman dari setiap stakeholder, khususnya para tenaga pendidik sebagai pelaksana pembelajaran di kelas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB IV pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan

proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Sehubungan dengan tugas mengajar guru, Sahertian (2010 : 134) mengemukakan :

Mengajar tidak sekedar mengkomunikasikan pengetahuan agar diketahui subjek didik, tetapi mengajar harus diartikan menolong si pelajar agar dapat belajar. Mengajar berarti usaha menolong sipelajar agar mampu memahami konsep-konsep dan dapat menerapkan konsep yang dipahami. Mengajar jangan dijadikan tugas rutin, mengajar bukan hanya suatu pengetahuan, tapi juga keterampilan atau memiliki kiat (seni) dalam mengajar. Mengajar harus dipersiapkan dengan baik. Guru perlu menyediakan waktu untuk mengadakan persiapan yang matang termasuk persiapan batin. Jadi guru seharusnya dipandang sebagai seorang ahli mode atau perancang program pembelajaran. Ia harus menguasai dan terlatih dalam menyusun skenario pembelajaran.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, maka salah satu hal dan yang pertama dilakukan adalah melakukan perencanaan proses pembelajaran. Efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan atau kegiatan termasuk kegiatan pembelajaran, dapat tercapai apabila direncanakan secara matang, karena dengan perencanaan yang baik, berbagai strategi, model, metode dan teknik dapat dikemas sedemikian rupa untuk dapat digunakan mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena tanpa perencanaan yang jelas akan mengakibatkan prosedur kerja menjadi tidak menentu, tidak jelas dan tidak terarah sehingga tujuan tidak tercapai dan akhirnya dapat mengecewakan pihak-pihak yang berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu proses pembelajaran diawali dengan perencanaan yang baik. Bilamana perencanaan pembelajaran

benar-benar dirancang dengan baik limapuluh persen pembelajaran sudah tercapai, tinggal lima puluh persen lagi saat proses pelaksanaan pembelajaran sedang berlangsung.

Putu, dkk (2013) mengemukakan :

Guru memiliki posisi yang menentukan keberhasilan dalam pembelajaran karena fungsi guru memiliki fungsi utama mulai dari merancang, mengelola dan mengevaluasi pembelajaran dalam suatu sekolah. Keberhasilan suatu proses pembelajaran diawali dengan perencanaan yang sangat matang. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan baik, ini merupakan setengah dari suatu keberhasilan sudah dapat tercapai, tinggal setengahnya lagi yang terletak pada pelaksanaan pembelajaran. Secara umum pada saat ini ada gejala atau fenomena dalam proses pembelajaran seringkali tanpa didukung dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang baik, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan tanpa persiapan dari guru menjadikan proses pembelajaran yang tidak dapat diterima dan tidak menarik bahkan tidak menyenangkan bagi siswa, kedatangan guru tidak tepat waktu, meninggalkan kelas sebelum waktunya, kegiatan penilaian yang tidak terorganisir dengan baik sehingga hasil evaluasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengatasi fenomena tersebut maka guru dituntut mampu menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Guru diharapkan menyusun sendiri perangkat pembelajaran tersebut disesuaikan dengan karakteristik siswa dan daya dukung sekolah. Karakteristik siswa dan daya dukung sekolah yang berada di kota tentu berbeda dengan yang berlokasi di desa.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang dikembangkan secara detail dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus merupakan langkah yang sangat penting dilakukan guru sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Perencanaan yang matang akan mengarahkan pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, menantang, kreatif, memotivasi dan menyenangkan. Adapun kegiatan perencanaan pembelajaran meliputi aspek sebagai berikut : penentuan identitas mata pelajaran, perumusan indikator, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan

materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemilihan media belajar, menentukan model pembelajaran, kesesuaian skenario pembelajaran, dan melakukan penilaian (Kemendikbud, 2013 : 37). Sementara dalam Permendikbud No 65 tahun 2013 disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).

Fadlillah, (2014 : 149) menguraikan RPP harus mencakup : 1) data sekolah, mata pelajaran dan kelas/semester; 2) materi pokok; 3) alokasi waktu; 4) tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; 5) materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan sumber belajar; 6) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; 7) penilaian. RPP sekurang-kurangnya memuat KD, indikator yang akan dicapai, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar serta penilaian.

Permendikbud No 65 tahun 2013 tentang Standar Proses bahwa setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

Suhatman (2013 : 10) dalam Soni (2014 : 7) mengatakan salah satu kewajiban guru sebelum melaksanakan pembelajaran adalah menyusun perangkat pembelajaran. RPP merupakan pedoman dan arahan tentang kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran oleh guru dari awal sampai dengan berakhirnya pembelajaran. Dalam arti bahwa agar apa yang diinginkan setelah proses pembelajaran berlangsung para peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tertentu sebagaimana yang ditentukan. Jika proses pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPP sebelumnya, tentu sudah bisa dipastikan bahwa proses pembelajaran akan berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RPP berfungsi sebagai kompas pembelajaran, dirancang oleh setiap guru berdasarkan standar yang telah ditentukan. Untuk itu dalam proses pembuatannya diperlukan pemahaman mendalam terhadap setiap komponen dan indikator RPP tersebut sehingga guru mampu merancang dan mengembangkan RPP dengan kemampuan yang dimilikinya.

Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa RPP merupakan rancangan pembelajaran wajib dipersiapkan oleh guru menjadi pegangan dan penuntun dalam proses pembelajaran di kelas, idealnya diserahkan awal semester tahun pelajaran. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan PKS kurikulum SMA Negeri 1 Raya diketahui bahwa hanya sekitar 40 % guru yang menyerahkan perangkat pembelajaran (RPP) awal semester, bahkan ada yang sampai satu semester berjalan baru diserahkan. Setelah dilakukan observasi terhadap lima

orang guru rumpun IPS, mereka tidak membawa RPP ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, dengan berbagai alasan yaitu satu orang mengatakan RPP ketinggalan di rumah, satu orang mengatakan disimpan di laci meja guru, dua orang mengatakan ada dilaptop dan belum diprint, yang mereka bawa ke kelas adalah buku teks dan absensi siswa, sementara satu orang guru membawa RPP ke kelas tetapi tidak menggunakannya, guru terfokus kepada buku teks. Tentu kondisi yang demikian adalah hal yang sangat memprihatinkan. Seharusnya apabila seorang guru mengajar tanpa persiapan maka guru tersebut tidak layak untuk mengajar.

Setelah guru rumpun IPS memperlihatkan RPP yang mereka buat ternyata setelah diamati dengan cermat bahwa ditemukan beberapa komponen RPP belum lengkap, seperti komponen tujuan pembelajaran tidak dicantumkan, metode pembelajaran yang kurang variatif, sumber belajar yang terbatas, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya masih dangkal dalam menggunakan pendekatan ilmiah sesuai kaidah Permendikbud No. 81 A tahun 2013, jenis penilaian belum mencakup aspek sikap, pengetahuan dan psikomotor dan sementara yang lain tidak mencantumkan rubrik penilaian.

Hasil penilaian awal kemampuan guru rumpun IPS dalam menyusun RPP di SMA Negeri 1 Raya, dengan menggunakan instrumen penilaian RPP yang dikeluarkan oleh Kemendikbud (2013), dapat dideskripsikan pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1. Hasil Penilaian Awal Kemampuan Guru Rumpun IPS Dalam Menyusun RPP di SMA Negeri 1 Raya

| No             | Aspek Yang Dinilai            | Kode Guru/Skor Perolehan |       |       |       |       | Rata-rata |       |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|
|                |                               | Gr1                      | Gr2   | Gr3   | Gr4   | Gr5   | Skor      | %     |
| 1              | Identitas Mata Pelajaran      | 2,00                     | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 3,00  | 2,20      | 73,33 |
| 2              | Perumusan Indikator           | 6,00                     | 5,00  | 6,00  | 5,00  | 6,00  | 5,60      | 62,22 |
| 3              | Perumusan Tujuan Pembelajaran | 4,00                     | 4,00  | 4,00  | 3,00  | 4,00  | 3,80      | 63,33 |
| 4              | Pemilihan Materi Ajar         | 7,00                     | 6,00  | 8,00  | 7,00  | 7,00  | 7,00      | 77,78 |
| 5              | Pemilihan Sumber Belajar      | 6,00                     | 5,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 5,80      | 64,44 |
| 6              | Pemilihan Media Belajar       | 6,00                     | 5,00  | 6,00  | 4,00  | 6,00  | 5,40      | 60,00 |
| 7              | Model Pembelajaran            | 4,00                     | 4,00  | 4,00  | 4,00  | 4,00  | 4,00      | 66,67 |
| 8              | Skenario Pembelajaran         | 9,00                     | 8,00  | 9,00  | 7,00  | 9,00  | 8,53      | 70,00 |
| 9              | Penilaian                     | 6,00                     | 5,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 5,71      | 48,33 |
| Jumlah Skor    |                               | 50,00                    | 44,00 | 51,00 | 40,00 | 51,00 | 48,00     |       |
| Nilai akhir    |                               | 66,67                    | 58,67 | 68,00 | 58,67 | 68    | 64,00     |       |
| Kategori Nilai |                               | C                        | K     | C     | K     | C     | C         |       |

Sumber : Data Primer hasil penilaian RPP pra siklus yang diolah (lampiran 4)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru rumpun IPS dalam menyusun RPP di SMA Negeri 1 Raya, masih tergolong rendah (kategori cukup) dengan nilai 64,00 terutama pada aspek Penilaian (48%), Pemilihan Media Belajar (60%), Perumusan Tujuan Pembelajaran (64%), Model Pembelajaran (64%), Pemilihan Sumber Belajar (65%), Skenario Pembelajaran (70%), Identitas Mata Pelajaran (71%), Perumusan Indikator (73%) dan Pemilihan Materi Ajar (76%).

Kondisi yang dialami oleh guru tersebut di atas merupakan suatu fenomena yang urgen untuk dituntaskan. Sebagai tenaga profesional seharusnya para guru menyadari kekeliruannya dan bersikap terbuka dengan apa yang mereka alami, sehingga kondisi tersebut di atas tidak akan pernah terjadi. Peneliti berasumsi bahwa para guru belum memahami sepenuhnya komponen-komponen dan indikator RPP dan bagaimana menyusun RPP yang sistematis dan lengkap. Perangkat pembelajaran yang diserahkan ke sekolah setiap tahun ajaran baru nampaknya

hanya sekedar melengkapi administrasi belaka, tidak ada tindakan supervisi oleh supervisor baik kepala sekolah maupun pengawas mata pelajaran. Disamping itu guru belum menyadari kesulitan yang dihadapi, ditambah dengan sikap guru tertutup sehingga tidak menyampaikannya kepada supervisor. Beberapa faktor yang patut diprediksi dapat memengaruhi ketidakmampuan guru menyusun RPP antara lain guru tidak mau mencoba menyusun sendiri, motivasi kurang, tidak fokus pada pekerjaan akibat banyaknya urusan pribadi dan keluarga, ketergantungan kepada sesama guru, adanya prototype guru tukang kritik dan terlalu sibuk, tersedia RPP yang bisa diunduh di internet dengan waktu yang singkat dan biaya yang murah.

Faktor lain yang tidak kalah penting dapat memengaruhi ketidakmampuan atau ketidakmauan guru menyusun RPP adalah kurang efektifnya supervisi bagi guru. Sebahagian guru sudah mendapat bimbingan melalui supervisi, namun belum benar-benar mahir dan sebagian lagi belum mendapatkan bimbingan. Artinya guru belum sepenuhnya mendapat pembinaan atau pembimbingan melalui supervisi pendidikan.

Supervisi pendidikan atau disebut supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang dapat membantu guru dalam pekerjaannya, mengembangkan profesinya, memperbaiki kekeliruan guru, membina guru dalam perencanaan maupun proses pembelajaran sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru NRS faktor penyebab ketidakmampuan guru menyusun RPP secara sistematis dan lengkap adalah kurangnya pemahaman terhadap komponen RPP seperti pemilihan model

pembelajaran dan bagaimana menerapkannya di kelas. Guru HLP menyatakan belum memahami komponen RPP khususnya dalam penerapan pendekatan ilmiah dan pemilihan model pembelajaran. Sementara guru SP dan JKP mengatakan seperti halnya supervisornya kurang memahami materi yang disampaikan, acuan yang digunakan dalam menyusun penilaian tidak jelas. Demikian juga guru RT mengatakan bahwa dia belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik menyusun RPP, bimbingan yang dia terima masih kurang. Umumnya guru mengatakan bahwa mereka mendapatkan RPP dari teman guru dan mengkolaborasikannya dengan contoh yang ada di internet alias *copy paste* tanpa disesuaikan dengan kondisi dan potensi sekolah serta karakteristik peserta didik dan ironisnya ternyata RPP yang mereka gunakan dari tahun ke tahun tidak ada perbaikan/penyempurnaan. Mereka juga mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan supervisi akademik model klinis, pendekatan yang digunakan oleh supervisor umumnya bersifat langsung (direktif).

Sebenarnya ada berbagai pendekatan, model dan teknik supervisi pendidikan. Pendekatan supervisi meliputi pendekatan direktif, pendekatan non direktif dan pendekatan kolaboratif. Model supervisi meliputi model konvensional, model ilmiah, model klinis, dan model artistik. Sementara teknik supervisi terdiri dari supervisi yang bersifat individual dan supervisi yang bersifat kelompok. Dengan demikian supervisor dapat memilih alternatif dari model, pendekatan dan teknik supervisi sesuai dengan masalah-masalah yang urgen untuk diterapkan dalam melaksanakan supervisi sehingga tujuan supervisi dapat tercapai dan fungsi supervisi benar-benar dirasakan oleh guru. Sebagaimana dikemukakan

Sergiovanni dalam Fatthurrohman dan Ruhyanani (2015 : 52) tujuan supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud 1) membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, mengelola kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu; 2) untuk memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian murid-muridnya. Memonitor disini bukan berarti untuk mencari kesalahan guru, melainkan lebih pada pengendalian dan peningkatan kualitas kinerja guru; 3) untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, dan mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh (*commitment*) terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Sementara fungsi supervisi dikemukakan Sahertian (2010 : 21) bahwa fungsi utama supervisi ialah perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran serta pembinaan pembelajaran sehingga terus dilakukan perbaikan pembelajaran.

Supervisor, sebelum melakukan supervisi seharusnya sudah terlebih dahulu membuat atau menyusun program pengawasan sebagai manajemen kinerja sehingga tujuan dan fungsi supervisi dapat terarah dan terwujud sesuai yang diharapkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Permenpan Nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, menetapkan tugas pokok pengawas ialah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi : 1) penyusunan program

pengawasan, 2) pelaksanaan pembinaan, 3) pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, 4) penilaian, 5) pembimbingan dan pelatihan profesional guru, 6) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan 7) pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Dengan demikian pengawas sekolah sebagai “gurunya guru” memiliki tugas pokok dan fungsi menilai dan membina.

Sesungguhnya masing-masing guru memiliki kemampuan yang besar, dan akan tampak bilamana mereka benar-benar mendapat kesempatan untuk dibina maupun dibimbing. Hanya hal tersebut belum sepenuhnya mereka peroleh. Disamping itu supervisi yang kurang efektif atau kurang maksimal menjadi salah satu kendala bagi guru untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Khususnya supervisi dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran merupakan hal yang tidak terlepas dari tufoksinya guru, hendaknya mendapat perhatian serius dari para supervisor sehingga kinerja guru meningkat dan berkontribusi positif terhadap hasil belajar siswa dan mutu pendidikan. Untuk itu profesi guru perlu dibina dan dikembangkan terus menerus agar dapat melakukan fungsinya secara profesional sebagaimana dikemukakan oleh Sahertian (2010 : 1) sebagai berikut :

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumberdaya pendidikan, guru merupakan komponen sumberdaya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus menerus. Pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikan pra jabatan (*pre-service education*) maupun program dalam jabatan. Tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik dan *kualified*. Potensi sumberdaya guru itu perlu terus menerus bertumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara profesional. Selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus menerus belajar menyesuaikan

diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat. Itulah alasan sebabnya mengenai perlunya supervisi.

Demikian juga dengan supervisor, Sagala (2013 : 235) mengemukakan:

Kenyataannya, beberapa guru tidak merasakan bahwa supervisor pengajaran mencurahkan waktu yang cukup untuk perbaikan pengajaran, jadi supervisor tidak memberikan bantuan yang diharapkan oleh guru. Kemudian dilihat dari penyiapan supervisor pengajaran, bahwa penyiapan supervisor pengajaran melalui *coursework*, praktek dan pengalaman lapangan untuk membantu supervisor menganalisis secara akurat kondisi-kondisi kelas dan memberi rekomendasi yang tepat untuk peningkatan belajar bagi para siswanya. Seorang supervisor dapat menggunakan berbagai teknik supervisi dalam upaya mengatasi problem dan tantangan yang dihadapi guru. Teknik-teknik supervisi tersebut digunakan berdasarkan masalah-masalah pokok yang dihadapi guru yang harus diperbaiki dalam mengajar.

Supervisi pada dasarnya mengandung unsur pembinaan, pembinaan yang dimaksud oleh Ametembun (2000 : 12) adalah “ berupa bimbingan dan tuntunan kearah pembinaan diri orang-orang yang disupervisi dalam arti memperbesar dan mengembangkan kesanggupannya untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan kesanggupan sendiri”.

Selanjutnya Bolla (dalam Sagala 2013 : 234) mengatakan bahwa supervisi merupakan keharusan bagi guru dengan alasan sulit untuk memisahkan, merefleksikan dan menyadari tingkah lakunya bila sedang berinteraksi dengan siswa di kelas. Beberapa problema yang dihadapi guru dilihat dari perbedaan antara lain adalah perbedaan latar belakang pendidikan, orientasi profesional, tujuan dan keterampilan, kesanggupan jasmani, kualifikasi kemampuan memimpin, kondisi psikologik dan pengalaman mengajar.

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, supervisi mendapat beberapa kendala atau masalah misalnya menyangkut orientasi supervisi yang dikemukakan Masaong (2013 : 4) sebagai berikut :

Bahwa dewasa ini kegiatan supervisi oleh sebagian supervisor (pengawas) masih berorientasi pada pengawasan (kontrol) dan obyek utamanya adalah administrasi, sehingga suasana kemitraan antara guru dan supervisor kurang tercipta dan bahkan guru secara psikologis merasa terbebani dengan pikiran untuk dinilai. Padahal kegiatan supervisi akan efektif jika perasaan terbebas dari berbagai tekanan diganti dengan suasana pemberian pelayanan serta pemenuhan kebutuhan yang bersifat informal.

Aspek lain yang mengakibatkan kegiatan supervisi kurang bermanfaat menurut Semiawan (dalam Imron 2000) adalah bahwa sistem supervisi kurang memadai dan sikap mental dari supervisor yang kurang sehat. Kurang memadainya sistem supervisi dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain: (1) supervisi masih menekankan pada aspek administratif dan mengabaikan aspek profesional, (2) tatap muka antara supervisor dan guru-guru sangat sedikit, (3) supervisor banyak yang sudah lama tidak mengajar, sehingga banyak dibutuhkan bekal tambahan agar dapat mengikuti perkembangan baru, (4) pada umumnya masih menggunakan jalur satu arah dari atas ke bawah, dan (5) potensi guru sebagai pembimbing kurang dimanfaatkan. Sedangkan dikaji dari sikap mental yang kurang sehat dari supervisor terlihat beberapa indikasi, yaitu; (1) hubungan profesional yang kaku dan kurang akrab akibat sikap otoriter dari supervisor, sehingga guru takut bersifat terbuka kepada supervisor, (2) banyak supervisor dan guru merasa sudah berpengalaman, sehingga merasa tidak perlu lagi belajar, (3) supervisor dan guru merasa cepat puas dengan hasil belajar siswa.

Sementara Sahertian (2010 : 131) memandang dari segi sifatnya bahwa “supervisi yang diberikan kepada guru-guru dalam tugas mengajar dan mendidik sampai saat ini masih bersifat umum. Oleh karena itu supervisi yang diberikan disebut supervisi yang umum (*general supervision*). Yang dibicarakan menyangkut masalah kegiatan belajar mengajar yang bersifat umum”.

Selanjutnya hasil penelitian Widodo (2007) dalam Riyanto, dkk (2015 : 2) bahwa permasalahan pengawasan yang muncul di lapangan menemukan bahwa pelaksanaan supervisi oleh pengawas di Indonesia masih jauh dari teori supervisi karena supervisi yang berlangsung selama ini masih cenderung kepada inspeksi atau pengawasan saja. Pengawasan yang dilakukan juga tidak rutin serta terkesan mencari-cari kesalahan dari guru. Kegiatan supervisi tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Permasalahan tersebut muncul karena adanya kendala-kendala baik secara struktur dan kultur. Secara struktur sebutan untuk orang yang melaksanakan supervisi adalah pengawas bukan supervisor, hal ini menyebabkan paradigma pemikiran mengarah ke inspeksi. Kendala lainnya adalah ruang lingkup dari pekerjaan pengawas cenderung menekankan pada aspek administratif, latar budaya kultural seperti budaya ewuh perkewuh menjadikan guru dan pengawas tidak terbuka dalam proses supervisi. Kondisi yang ada saat ini jumlah pengawas pendidikan yang tidak seimbang dengan jumlah sekolah dan guru yang harus diawasi menjadikan beban tugas pengawas menjadi sangat berat dan akhirnya tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Supervisi pada hakikatnya haknya guru dan merupakan bagian pengembangan profesional guru, sayangnya banyak guru yang tidak

memahaminya sehingga jarang guru menyampaikan permasalahan yang dihadapi di kelas atau menyangkut perencanaan, proses maupun penilaian pembelajaran. Singkatnya, amat jarang guru meminta sendiri supervisor untuk melaksanakan supervisi. Guru hanya bersifat menunggu dengan was-was kapan supervisor datang ke sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru rumpun IPS di SMA Negeri 1 Raya ternyata mereka belum memahami bahwa supervisi itu adalah hak mereka, dan merupakan kebutuhan pengembangan profesionalnya. Mereka menganggap bahwa supervisor itu lebih fokus kepada pengawas sekolah. Mereka berpendapat supervisi yang mereka terima belum sesuai dengan kebutuhan mereka, belum direncanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagian guru menganggap bahwa supervisi itu sebagai shock terapi karena persepsi mereka terhadap supervisi condong terhadap evaluasi kinerja, mencari-cari kesalahan, menggurui dan lain sebagainya sehingga mereka enggan bahkan merasa senang bila tidak disupervisi. Padahal supervisi intinya bukan evaluasi dan bukan mencari kesalahan atau kekurangan guru melainkan arahnya adalah pembinaan demi pengembangan profesi. Sebenarnya melalui supervisi problema yang dihadapi guru menyangkut profesinya dapat diatasi, dampaknya kinerja guru akan semakin baik, dan implikasinya peningkatan mutu pendidikan pun akan semakin nyata.

Supervisi akan lebih bermakna dan tepat sasaran bilamana guru sendiri menyadari permasalahan yang dihadapinya dan dengan sikap terbuka menyampaikannya kepada supervisor ibarat pasien yang visit dengan dokter, pasien akan memberitahukan keluhan kesah, perasaannya, memberitahukan mana

bagian tubuhnya yang sakit dan sebagainya dengan demikian dokter akan lebih mudah mendiagnosa jenis penyakit yang diderita dan menentukan jenis tindakan yang akan dilakukan dokter. Demikian pula halnya guru ibarat pasien dan supervisor ibarat dokter bilamana guru mengalami kesulitan sesuai dengan tufoksinya dan menyampaikannya kepada supervisor, maka supervisor akan lebih mudah memberikan tindakan atau solusi terhadap kesulitan yang dialami guru tersebut. Jadi dengan demikian sangat dibutuhkan adanya komunikasi maupun koordinasi efektif, harmonis dan berkelanjutan antara guru dan supervisor. Guru memahami haknya mendapat supervisi dan supervisor juga memahami kewajibannya memberi supervisi dengan demikian akan terjalin interaksi dan komunikasi yang baik.

Supervisi pendidikan dapat dilaksanakan dengan berbagai pendekatan, model dan teknik, yang dapat membantu guru mengatasi berbagai kesulitan dalam kegiatan pengajarannya. Terkait dengan kemampuan guru menyusun RPP, diprediksi pendekatan yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kolaboratif, dengan model klinis. Adapun pendekatan kolaboratif menurut Sahertian (2010 : 49) cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non direktif menjadi cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini baik supervisor maupun guru bersama-sama, bersepakat untuk menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan

aktivitas individu. Sedangkan model klinis memiliki ciri tercipta hubungan manusiawi (terbuka, penuh kedekatan dan kehangatan), memotivasi, instrumen atas kesepakatan bersama, muncul dari harapan dan dorongan guru, balikan diberikan secara objektif dan secepat mungkin. Sementara itu pemberian supervisi klinis memiliki prinsip-prinsip klinis antara lain bersifat interaktif dan kesejawatan, guru bebas mengemukakan masalahnya, masalah yang riil dihadapi guru dan dipusatkan unsur yang lebih spesifik. Intinya bahwa supervisi klinis adalah suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan pada guru berdasarkan kebutuhannya melalui siklus yang sistematis, diawali dengan pertemuan awal, perencanaan, observasi yang cermat, dan kajian balikan sesegera dan seobjektif mungkin tentang penampilan mengajarnya yang nyata, untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan sikap profesional guru. Sementara teknik supervisi kelompok dipergunakan bagi sejumlah guru yang mengalami permasalahan relatif sama.

Pada umumnya guru-guru SMA Negeri 1 Raya Kabupaten Simalungun sudah mendapatkan pelatihan dan bimbingan baik melalui MGMP, sekolah atau dinas mengenai implementasi kurikulum 2013 namun model pelaksanaannya masih berbasis guru belum berbasis satuan pendidikan (sekolah). Artinya para guru mendapat pelatihan atau bimbingan secara individual dan diharapkan mereka membagikan kepada sesama guru di sekolah. Sementara itu bilamana ada hal-hal yang kurang dipahami tentu akan lebih baik bila didiskusikan bersama. Memecahkan permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan duduk bersama dengan supervisi pendekatan kolaboratif, seperti dikemukakan oleh Joni dalam

(Yusra 2014 : 8) bahwa pendekatan kolaboratif diterapkan untuk menciptakan adanya hubungan kesejawatan antara guru dengan guru, guru dengan pengawas dengan mendiskusikan secara bersama apa yang harus dikerjakan dan belajar bersama dari apa yang dikerjakan. Dalam hal ini guru bukanlah satu-satunya orang yang harus memecahkan masalahnya sendiri tetapi ada orang lain yang terlibat dan mereka merupakan satu tim yang sama posisinya. Sudah pernah juga dilakukan pembinaan secara kelompok, namun nampaknya supervisi yang diperoleh guru sifatnya kurang merespon minat dan motivasi, terbatas, tidak sistematis dan berkelanjutan.

Sesuai dengan hasil wawancara terhadap guru rumpun IPS, pengawas mata pelajaran geografi, dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Raya bahwa supervisi model klinis, dan supervisi pendekatan kolaboratif belum pernah diterapkan oleh supervisor terhadap guru di SMA Negeri 1 Raya, dimana sudah tiga tahun SMA Negeri 1 Raya menjadi salah satu sekolah rintisan dalam penerapan kurikulum 2013 di Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan pola pikir yang dikemukakan di atas, dapat diprediksi bahwa melalui supervisi klinis, kemampuan guru menyusun RPP dapat ditingkatkan. Untuk mengkaji bagaimana penerapan supervisi klinis ini dapat membantu meningkatkan kemampuan guru menyusun RPP perlu dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Supervisi Klinis Dalam Meningkatkan Kemampuan Guru Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA Negeri 1 Raya Kabupaten Simalungun”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, dapat diidentifikasi berbagai masalah dan upaya yang dapat dilakukan dalam membantu meningkatkan kemampuan guru menyusun RPP antara lain: (1) Guru kurang memiliki motivasi dan komitmen yang kuat, (2) Guru belum mencoba membuat sendiri RPP, (3) Berbagai jenis prototype guru seperti guru tukang kritik dan guru yang terlalu sibuk, (4) Supervisi yang diperoleh kurang merespon minat dan memotivasi guru, (5) Guru belum memahami bahwa supervisi adalah kebutuhan mereka, (6) Guru belum mendapat supervisi yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah, (7) Guru belum mendapat supervisi mengenai penyusunan RPP, (8) Belum optimalnya supervisi yang diterima oleh para guru, (9) Tersedianya alternatif RPP di internet atau media lainnya yang dapat diunduh dengan waktu dan biaya yang sedikit sehingga guru tidak termotivasi membuat sendiri RPP, (10) Guru belum pernah mendapat pembinaan melalui supervisi klinis.

Berbagai usaha yang dapat dilakukan membantu meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP antara lain : (1) Workshop/Lokakarya melalui MGMP/KKG, (2) Bimbingan teknis, (3) Diskusi sesama guru, (4) Belajar mandiri, (5) Tutor sebaya, (6) IHT, (7) Studi lanjut, (8) Pendidikan dan Latihan, (9) Mengaktifkan MGMP/KKG di sekolah, (10) Memberi bantuan melalui Supervisi Klinis.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, banyak faktor yang diduga memengaruhi kemampuan guru menyusun RPP, namun dalam penelitian ini faktor tersebut dibatasi hanya pada penerapan supervisi klinis dengan pendekatan kolaboratif, dengan pertimbangan bahwa supervisi klinis pada intinya adalah memberikan bantuan profesional secara sistematis kepada guru baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan atau kekurangan yang dimiliki guru. Subjek penelitian ini dibatasi hanya pada guru rumpun IPS di SMA Negeri 1 Raya, sesuai dengan observasi awal ditemukan gejala-gejala ketidakmampuan guru dalam menyusun RPP.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut "Apakah supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan guru rumpun IPS dalam menyusun RPP di SMA Negeri 1 Raya?"

### **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan guru rumpun IPS dalam menyusun RPP di SMA Negeri 1 Raya.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tindakan sekolah ini adalah:

- 1) Manfaat Teoretis

Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kajian penelitian ini khususnya dalam supervisi klinis.

## 2) Manfaat Praktis

Penelitian tindakan sekolah ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis.

- a) Bagi dinas pendidikan sebagai informasi untuk menentukan kebijakan dalam peningkatan kinerja guru.
- b) Bagi supervisor, konsep supervisi klinis dapat dijadikan alternatif dalam melaksanakan supervisi untuk membina guru, khususnya dalam menyusun RPP.
- c) Bagi guru, mampu meningkatkan kompetensi pedagogik, khususnya dalam perbaikan perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran; memotivasi guru agar mendapatkan supervisi klinis sebagai solusi dalam pengembangan kompetensi dan profesinya.
- d) Bagi sekolah, dengan adanya supervisi klinis dapat membantu meningkatkan kinerja dan mutu sekolah.
- e) Bagi peneliti lain, sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian lanjutan yang relevan.